



Dinamika Kepemimpinan Perempuan di Tingkat Lokal: Menilik Tantangan dan Peluangnya

RINGKASAN HASIL TEMUAN

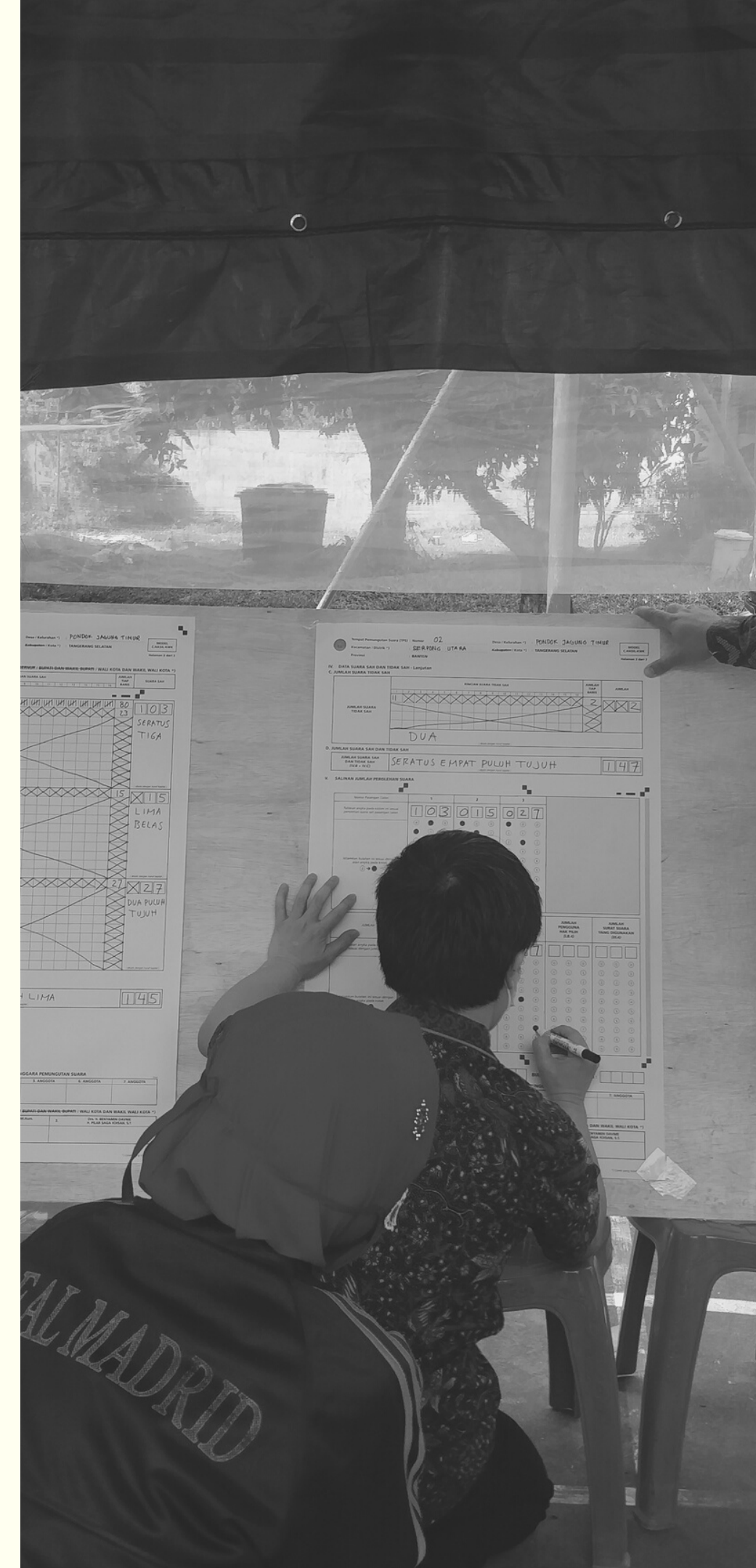
Latar Belakang



- Pilkada langsung serentak diatur dalam UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota → tidak ada pasal afirmasi.
- Rata-rata persentase pencalonan perempuan selama 4 pilkada serentak (2015, 2017, 2018, dan 2020) adalah 8,6%.
- Rata-rata persentase keterpilihan perempuan selama 4 pilkada serentak (2015, 2017, 2018, dan 2020) adalah 8,9%.
- Data di atas menunjukkan bahwa **persentase pencalonan perempuan sebagai kepala daerah masih sangat rendah.**

Pertanyaan Penelitian

- Apa yang menjadi karakter khas kepemimpinan perempuan di pemerintahan daerah; termasuk di dalamnya keragaman latar belakang dan kategori sosial yang melekat pada dirinya (kader partai, birokrat, kerabat, pengusaha, profesional)?
- Bagaimana perempuan kepala daerah menegosiasi identitas gender mereka dalam berelasi dengan partai, konstituen dan birokrasi yang relevan di pemerintahan daerah; terutama di tiga tahapan utama pencalonan, proses kampanye, dan setelah terpilih?



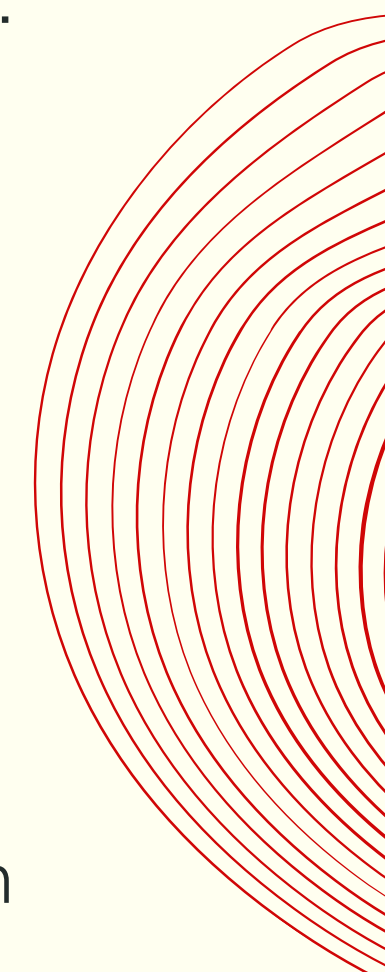
Cakupan Riset

Riset mencakup 8 perempuan kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota:

1. Gubernur Jawa Timur: Khofifah Indar Parawansa
2. Bupati Jember (Jawa Timur): Faida
3. Bupati Grobogan (Jawa Tengah): Sri Sumarni
4. Bupati Kendal (Jawa Tengah): Mirna Annisa
5. Bupati Purwakarta (Jawa Barat): Anne Ratna Mustika
6. Bupati Karawang (Jawa Barat): Cellica Nurrachadiana
7. Walikota Surabaya (Jawa Timur): Tri Rismaharini
8. Walikota Batu (Jawa Timur): Dewanti Rumpoko

Pengumpulan data dilakukan melalui FGD dan wawancara mendalam yang dilakukan pada November 2019 sampai dengan November 2020.

CWI melakukan wawancara mendalam dengan 6 dari 8 perempuan kepala daerah. FGD dan wawancara mendalam juga dilakukan dengan beragam informan yang mencakup anggota DPRD, pengurus partai di daerah, organisasi perempuan, aktivis masyarakat sipil, akademisi dan jurnalis.

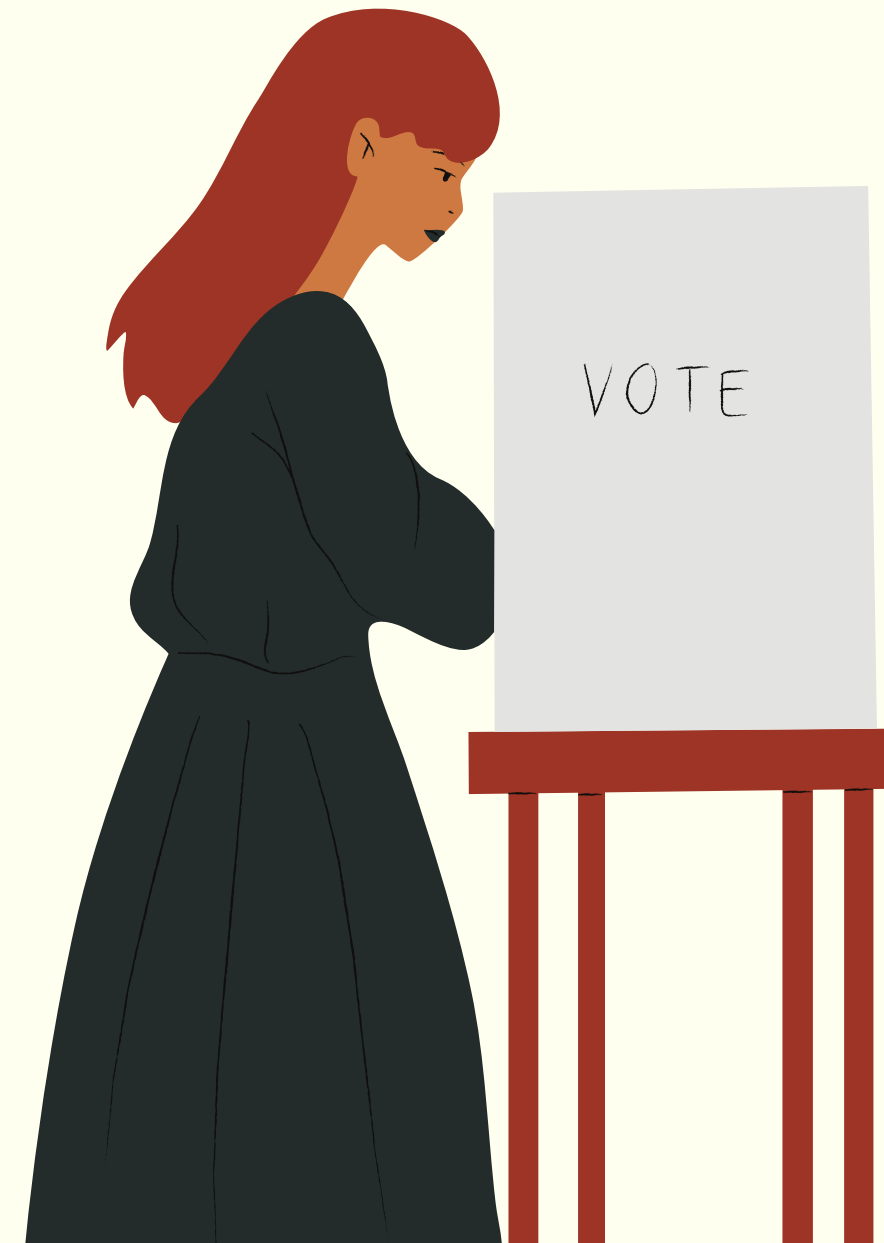
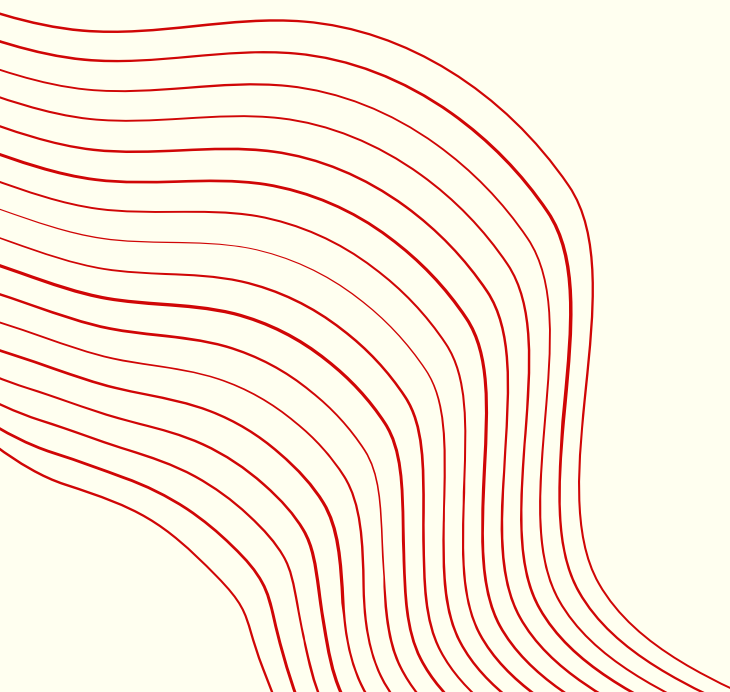


Temuan 1: Tantangan

- Perempuan kepala daerah dari beragam latar belakang—kader partai/politisi, birokrat, profesional, istri mantan kepala daerah, pengusaha—mengalami **dinamika dalam membangun dan merawat relasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan** terutama partai politik.
- **Dinamika ini sarat dengan bias dan relasi timpang** karena identitas sebagai perempuan, ibu dan istri yang berkelindan. Hal ini dialami oleh perempuan dalam masa pencalonan, kampanye dan selama kepemimpinannya. Perempuan kepala daerah kerap kali menghadapi serangan karena identitas gendernya

Temuan 2: Tantangan

- Tafsir dominan agama bahwa perempuan bukan pemimpin. Untuk mendapatkan dukungan publik, perempuan harus berstrategi untuk mendapatkan legitimasi.



Temuan 3: Tantangan

Pemetaan Lokus Tantangan Bagi Perempuan Kepala Daerah:

	Pencalonan	Kontestasi/Kampanye	Pasca Terpilih/Kepemimpinan
Partai Politik	V	V	V
Organisasi Masyarakat		V	
Pemuka Agama	V	V	
Media		V	V
DPRD			V
Birokrasi Pemerintahan Daerah			V

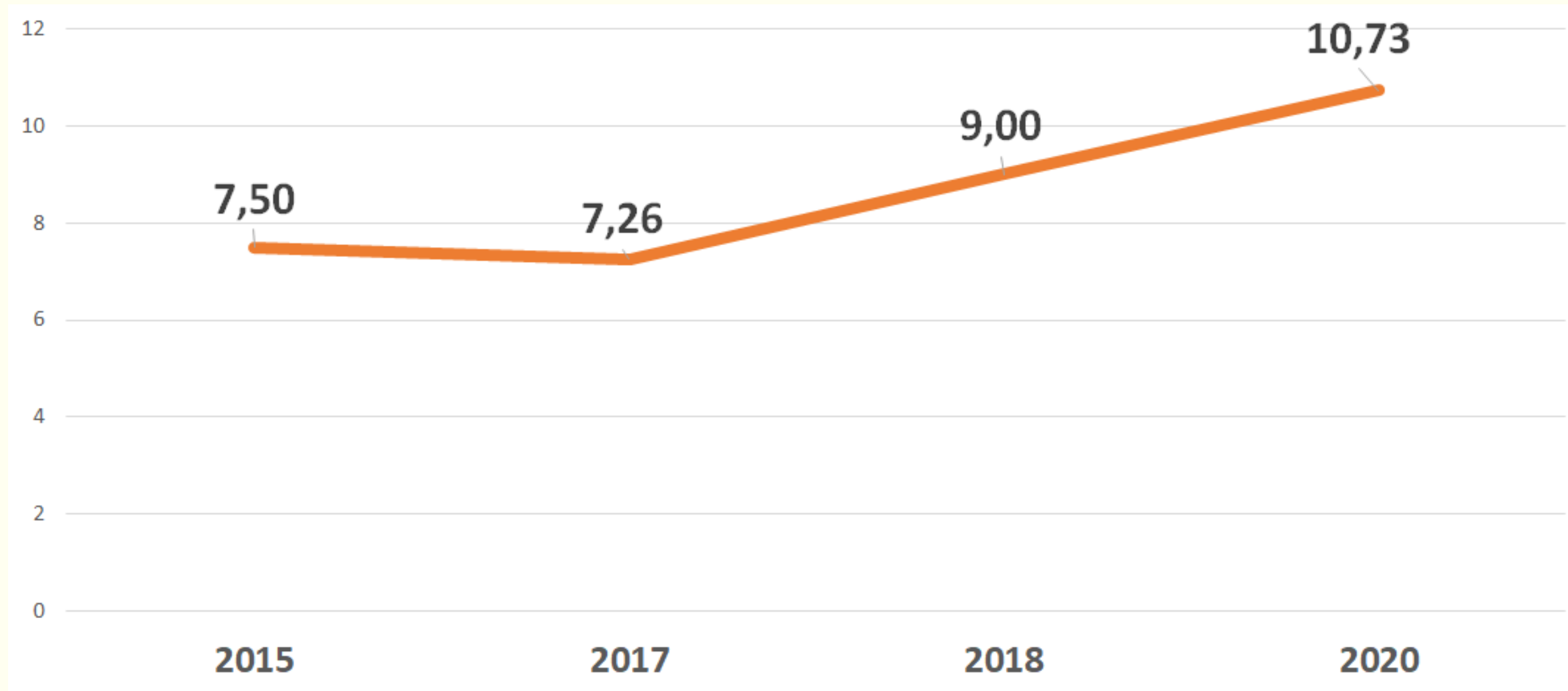
Temuan 4: Peluang

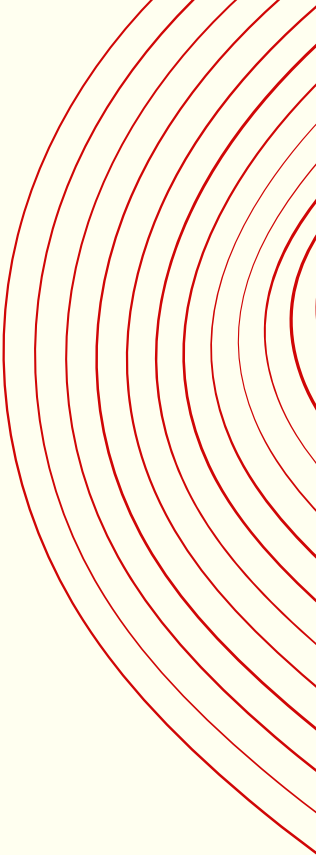
Data kuantitatif menunjukkan adanya **peningkatan jumlah calon perempuan kepala daerah dan wakil kepala daerah** pada Pilkada Serentak 2015, 2017, 2018, 2020. Meskipun jumlah pencalonan perempuan dalam pilkada sangat rendah jika dibandingkan dengan pencalonan laki-laki, data yang dihimpun Cakra Wikara Indonesia (CWI) dalam 4 masa pilkada serentak menunjukkan tren peningkatan persentase pencalonan perempuan, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dan grafik berikut:

**Perbandingan Pencalonan Perempuan dan Laki-Laki
Pada Pilkada Serentak 2015, 2017, 2018 dan 2020**

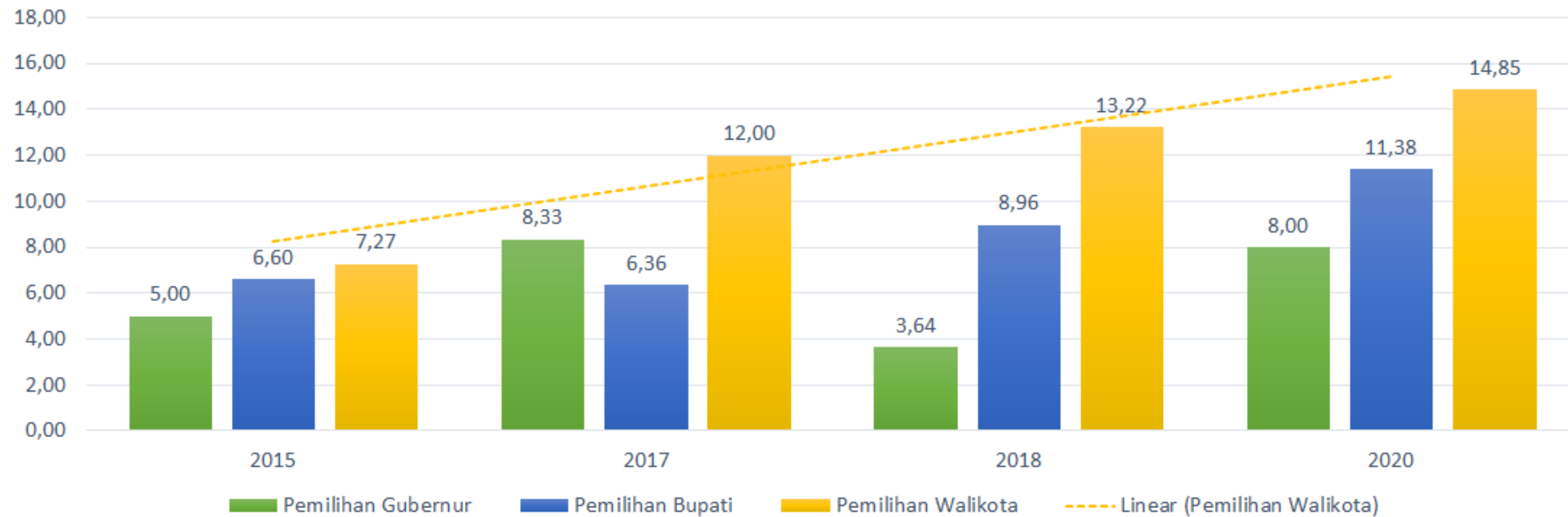
Pilkada	Total Calon	Calon Laki-Laki	Calon Perempuan
2015	1654	1530	124 (7,50%)
2017	620	575	45 (7,26%)
2018	1044	950	94 (9,00%)
2020	1482	1323	159 (10,73%)

Grafik Persentase Pencalonan Perempuan Pada Pilkada Serentak 2015, 2017, 2018, dan 2020





Pencalonan Perempuan Di Pilkada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

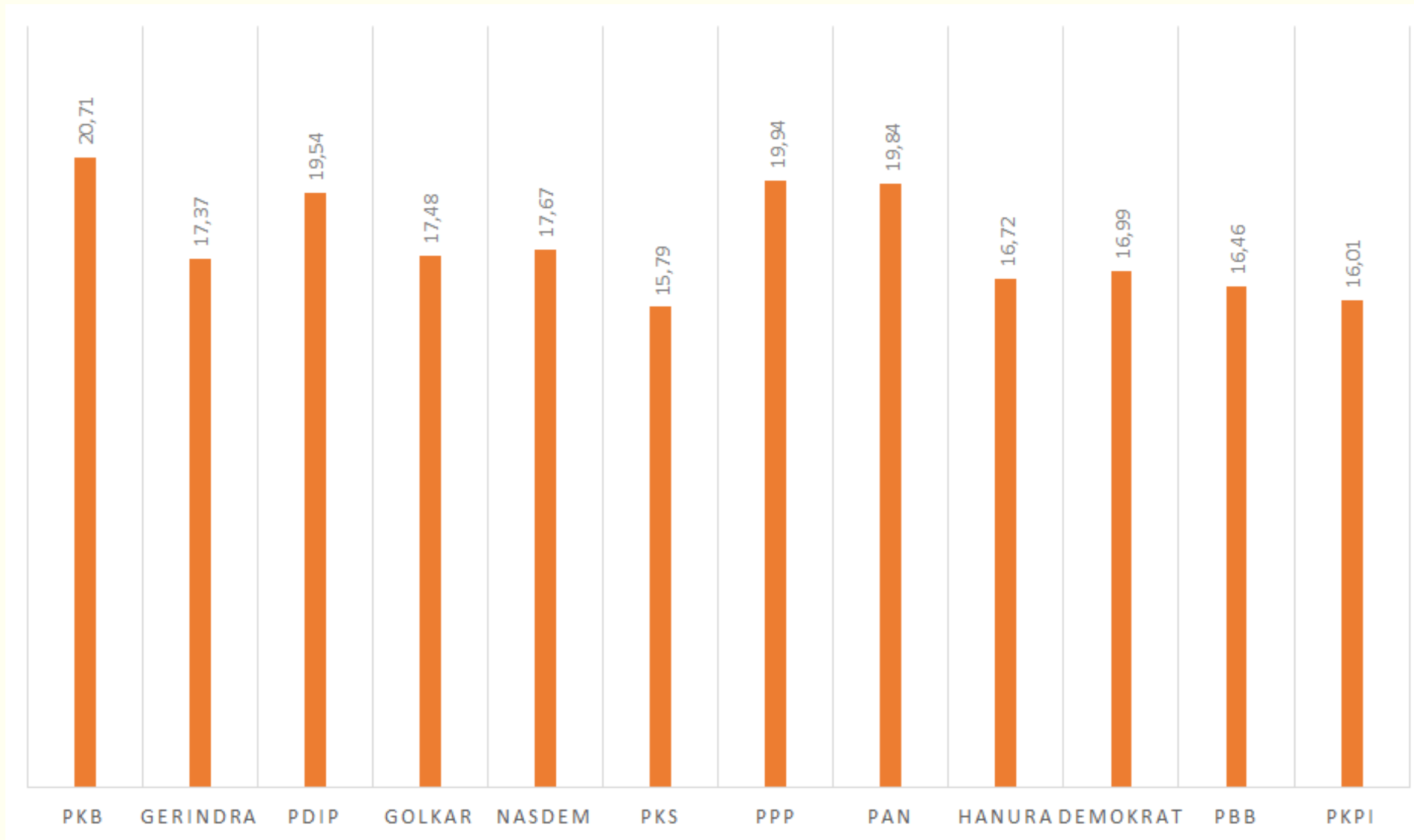


Temuan 5: Peluang

- Data menunjukkan **komitmen yang baik dari partai politik berbasis keagamaan**, seperti terlihat dalam data yang menunjukkan sebaran pencalonan perempuan oleh partai politik dalam 4 masa pilkada serentak.
- PKB adalah partai yang paling baik komitmen pencalonan perempuan di 4 masa pilkada dengan rata-rata persentase sebesar 20,71%. Terbaik selanjutnya adalah PPP (19,94%) dan PAN (19,84). Hal ini merupakan temuan yang menarik bahwa dalam 4 masa pilkada serentak dari 2015, 2017, 2018 dan 2020, komitmen pencalonan perempuan yang paling baik berasal dari PKB, PPP dan PAN yang merupakan partai-partai yang berbasis keagamaan.

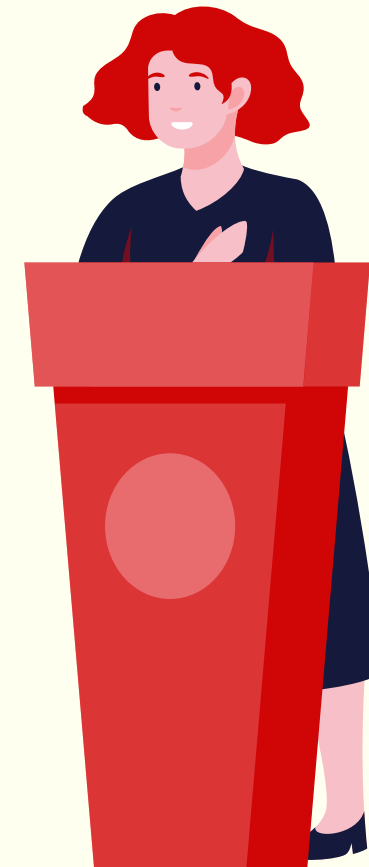


Rata-Rata Persentase Pencalonan Perempuan oleh Parpol Pada 4 Masa Pilkada

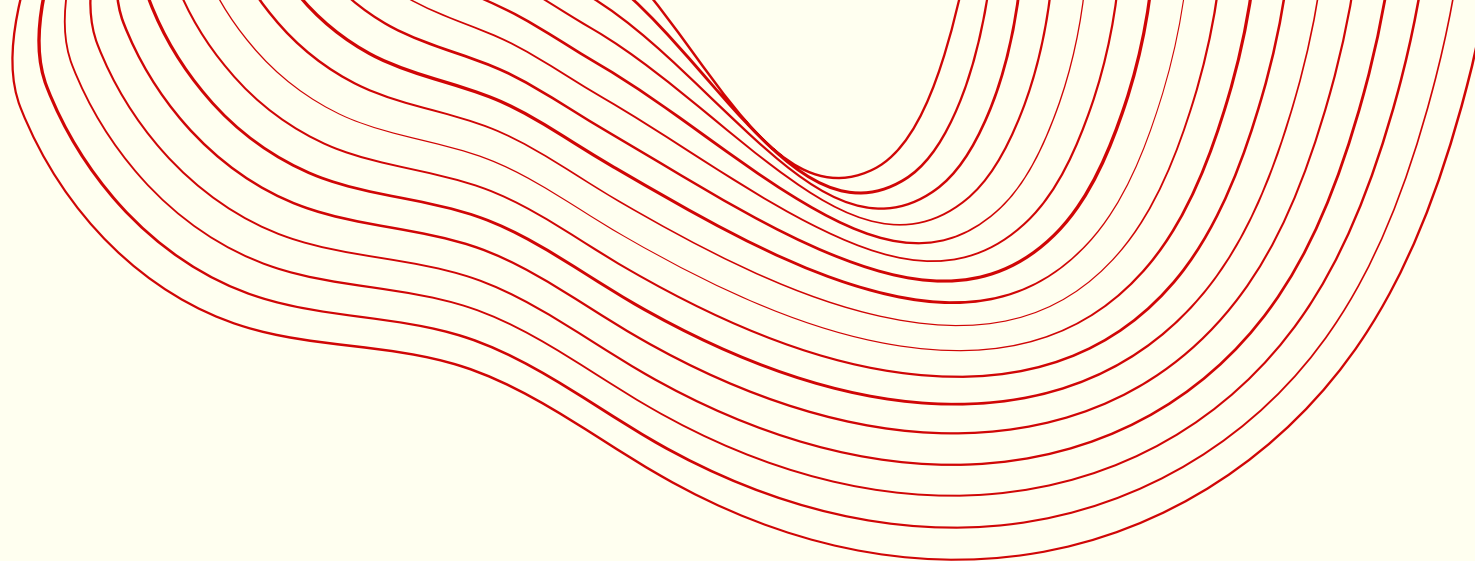


Temuan 6: Peluang

Data keterpilihan perempuan baik sebagai kepala maupun wakil kepala daerah cenderung mengalami kenaikan. Hasil Pilkada 2020 menunjukkan persentase tertinggi keterpilihan perempuan dalam pilkada (11,02%).



*data tahun 2020 masih mencakup 236 wilayah dari 270 wilayah dengan basis data berita acara, SK Penetapan Rekapitulasi, dan SK Penetapan Pasangan Terpilih.



Jumlah Perempuan Terpilih Sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 di Tiga Provinsi

Provinsi	Total Jabatan Kepala dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perempuan Terpilih Kepala dan Wakil Kepala Daerah
Jawa Barat	14	2 (14,3%)
Jawa Tengah	40	11 (27,5%)
Jawa Timur	38	9 (23,7%)

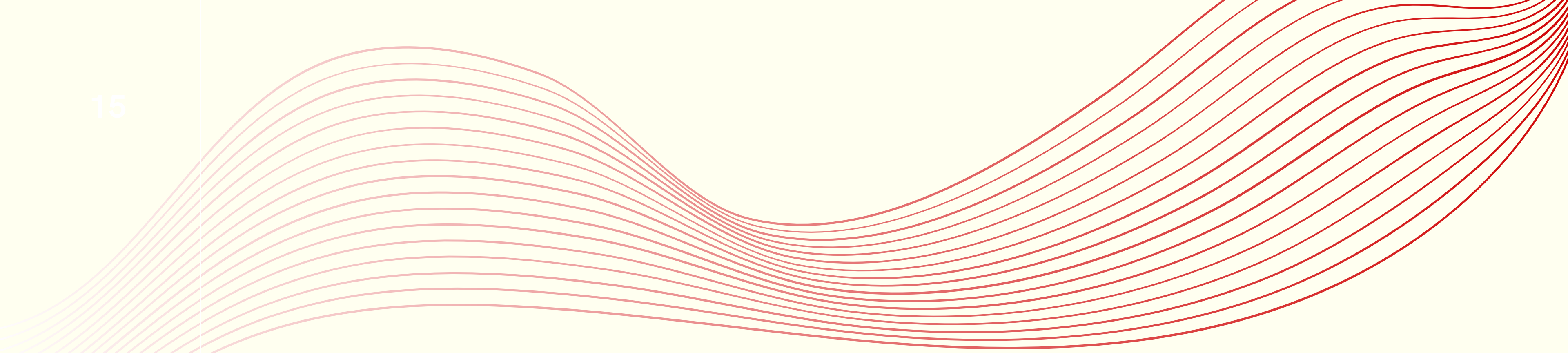


Kesimpulan

- Tantangan terhadap kepemimpinan perempuan muncul dari beragam pemangku kepentingan sejak pencalonan sampai masa kepemimpinannya. Tantangan terbesar berasal dari partai politik.
- Perempuan kepala daerah menunjukkan mampu melampaui tantangan tersebut dengan menegosiasikan identitas gendernya.
- Dukungan partai politik terhadap perempuan di tingkat lokal ditunjukkan dengan meningkatnya tren angka pencalonan secara perlahan.
- Sejalan dengan angka pencalonan perempuan, angka keterpilihan perempuan sebagai kepala daerah juga menunjukkan tren meningkat. Kepercayaan pemilih terhadap calon perempuan kepala daerah mengalami peningkatan.

Rekomendasi

- CWI mendorong partai politik untuk menegakkan prinsip inklusif, non-diskriminatif dan transparan dalam mencalonkan perempuan kepala daerah.
- CWI meminta partai politik untuk meningkatkan pencalonan perempuan sebagai kepala daerah karena data menunjukkan persentase keterpilihan perempuan lebih tinggi dari persentase pencalonannya.
- CWI menghimbau agar partai politik memberikan dukungan yang sungguh-sungguh bagi perempuan kepala daerah dengan meletakkan relasi yang lebih setara antara DPRD dengan kepala daerah.
- CWI mendorong media dan masyarakat sipil untuk mendesak komitmen dari partai politik melalui kampanye publik mendorong kepemimpinan yang inklusif gender.



TWITTER | INSTAGRAM

@cakrawikara

FACEBOOK | LINKEDIN | YOUTUBE

Cakra Wikara Indonesia

WEBSITE

cakrawikara.id

